BABI

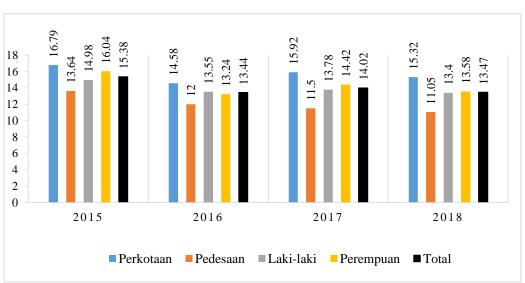
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah sosial yang dihadapi setiap negara di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk bagi perekonomian, individu dan masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga akan timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya (Sukirno, 2006).

Pengangguran menjadi persoalan yang cukup serius di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Bertambahnya angkatan kerja yang tidak diiringi dengan tersedianya lapangan dan kesempatan kerja akan menimbulkan jumlah pengangguran semakin tinggi khususnya usia muda.

Menurut Statistik Pemuda Indonesia (SPI) pemuda adalah penduduk berumur 16-30 tahun, sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 2009 pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan definisi tersebut batasan pengangguran usia muda adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang berada pada kelompok usia 16-30 tahun.



Gambar 1. 1 Pengangguran Usia Muda di Indonesia Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2015–2018 (Persen)

Sumber: BPS, Sakernas 2015-2018, diolah

Grafik 1.1 menunjukkan pengangguran usia muda di Indonesia menurut tipe daerah dan jenis kelamin selama tahun 2015–2018. Pengangguran usia muda tertinggi dalam kurun waktu 2015–2018 sebesar 15,38% pada tahun 2015. Tahun berikutnya pengangguran usia muda mengalami penurunan sebesar 1,94%. Hal itu terjadi dikarenakan pada tahun 2016 adanya perbaikan ekonomi, maka permintaan industri terhadap sumber daya atau angkatan kerja produktif mengalami peningkatan.

Permasalahan kependudukan yang dihadapi di Pulau Jawa dan Sulawesi tidak jauh berbeda dengan permasalahan pada tingkat nasional yaitu masalah pengangguran. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk menurunan tingkat pengangguran, tetapi masih ada beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 tingkat pengangguran

Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat diurutan pertama dan kedua di Indonesia yaitu sebesar 8,52% dan 8,17%, selanjutnya Provinsi Sulawesi Utara diurutan kelima dengan angka sebesar 6,86%. Salah satu faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten yaitu rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya. Padahal di sisi lain lapangan kerja cukup banyak di Banten. Meskipun lapangan kerja cukup banyak tetapi pengangguran masih tinggi karena angkatan kerjanya tidak bisa memenuhi kompetensi yang diinginkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Banten. Sedangkan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh kondisi industri, dengan memiliki jumlah industri yang besar sehingga menarik penduduk dari luar untuk melakukan perpindahan. Migrasi industri ini menyebabkan lapangan pekerjaan semakin berkurang. Di Provinsi Sulawesi Utara tingkat pengangguran sebagian besar menumpuk di perkotaan. Hal ini terjadi karena para pencari kerja apabila di kota mempunyai peluang mendapakan pekerjaan lebih besar dan banyak pilihan pekerjaan dibanding desa, serta peningkatan angkatan kerja setiap tahunnya sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja di kota dan kemudian pengangguran mengalami peningkatan. Data lebih lengkap disampaikan melalui tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi Tahun 2018 (Persen)

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran
1	Banten	8,52
2	Jawa Barat	8,17
3	Maluku	7,27
4	Kepulauan Riau	7,12
5	Sulawesi Utara	6,86
6	Kalimantan Timur	6,60
7	Aceh	6,36
8	Papua Barat	6,30
9	DKI Jakarta	6,24
10	Riau	6,20

Sumber: BPS, Sakernas 2018

Tabel 1. 2 Pengangguran Usia Muda Pulau Jawa dan Sulawesi Menurut Provinsi Tahun 2015–2017 (Persen)

Provinsi -	Tahun			
T I UVIIISI -	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	14,31	12,50	13,98	
Jawa Barat	20,52	19,84	20,47	
Jawa Tengah	14,22	12,72	12,59	
DI Yogyakarta	12,05	8,11	8,91	
Jawa Timur	13,27	11,26	11,70	
Banten	19,61	18,10	19,47	
Sulawesi Utara	22,73	17,00	21,24	
Sulawesi Selatan	14,71	10,86	13,53	
Sulawesi Tengah	10,58	7,23	8,98	
Sulawesi Tenggara	12,91	5,92	7,97	
Gorontalo	11,43	6,75	11,74	
Sulawesi Barat	7,71	7,80	8,21	

Sumber: BPS, Sakernas 2015–2017

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengangguran usia muda tertinggi dalam kurun waktu 2015–2017 yaitu terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata

sebesar 20,28%. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, pengangguran usia muda terendah dengan rata-rata sebesar 7,90% yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Tingginya pengangguran usia muda di Provinsi Jawa Barat disebabkan besarnya jumlah pelajar. Sedangkan angka pengangguran usia muda yang tinggi karena para pelajar yang sudah lulus sekolah kesulitan memperoleh pekerjaan. Selain itu, juga disebabkan karena jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi yaitu sebesar 22,39 juta pada tahun 2017 bahkan menduduki urutan pertama dengan jumlah angkatan kerja tertinggi di Indonesia, selanjutnya adalah di Provinsi Jawa Timur dengan angka sebesar 20,93 juta. Dari jumlah tersebut termasuk penambahan angkatan kerja yang datang dari luar daerah sehingga masyarakat Jawa Barat sendiri semakin sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Dimana beberapa provinsi pada tahun tertentu masih terdapat kenaikan angka pengangguran. Dengan masih adanya kenaikan angka pengangguran, berarti masalah pengangguran belum dapat teratasi secara berkelanjutan. Untuk mengatasi pengangguran, diperlukan kesediaan jumlah lapangan kerja yang seimbang dengan tenaga kerja yang tersedia (Mahayana & Sukadana, 2014).

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pengangguran usia muda yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan nilai bersih dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. PDRB yang meningkat akan memberikan pengaruh positif terhadap jumlah pengangguran karena jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat sehingga peningkatan dalam nilai tambah barang dan jasa akhir dapat menyerap tenaga kerja lebih tinggi (Yudhiarso et al., 2015). Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi dalam satuan miliar rupiah tahun 2015–2017 dapat dilihat dalam tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2015–2017 (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun			
Provilisi	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	1.454.563,85	1.540.078,20	1.635.855,75	
Jawa Barat	1.207.232,34	1.275.527,64	1.342.953,38	
Jawa Tengah	806.765,09	849.313,20	894.050,47	
DI Yogyakarta	83.474,45	87.688,20	92.300,66	
Jawa Timur	1.331.376,10	1.405.561,04	1.482.147,59	
Banten	368.377,20	387.824,35	409.959,69	
Sulawesi Utara	70.425,33	74.764,66	79.484,03	
Sulawesi Selatan	250.802,99	269.401,31	288.814,17	
Sulawesi Tengah	82.787,20	91.014,56	97.474,86	
Sulawesi Tenggara	72.993,33	77.745,51	83.001,69	
Gorontalo	22.068,80	23.507,21	25.090,13	
Sulawesi Barat	25.964,43	27.524,77	29.282,49	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015–2017

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa di Pulau Jawa dan Sulawesi dalam kurun waktu 2014–2017 nilai PDRB tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan rata—rata sebesar 1.543.279.96 miliar rupiah. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, nilai PDRB terendah dengan rata—rata sebesar 23.555,38 miliar rupiah yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Dapat dilihat bahwa secara umum PDRB pada masing—masing provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini seharusnya dapat mengurangi angka pengangguran di Pulau Jawa dan Sulawesi. Namun, kenyataannya pertumbuhan nilai PDRB yang diharapkan bisa menjadi

salah satu solusi mengatasi pengangguran, ternyata masih sangat terbatas di dalam menyerap angkatan kerja.

Selain PDRB, tingkat upah minimum daerah juga merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Perbaikan sistem upah melalui kebijakan upah minimum merupakan usaha pemerintah di dalam memperbaiki masalah ketenagakerjaan. Upah minimum inilah yang akan dipakai oleh para pengusaha sebagai standar minimum di dalam memberikan upah kepada para pekerja. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi juga tingkat pengangguran di wilayah tersebut (Kaufman & Hotchkiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan di suatu wilayah, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih besar. Akibatnya perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Higgins (1997) menunjukkan bahwa upah berpengaruh positif pada pengangguran usia muda, semakin tinggi upah relatif pemuda akan berlawanan dengan orang dewasa dengan inisiatif yang lebih sehingga perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan orang dewasa sebagai lawan pemuda sehingga menimbulkan pengangguran usia muda. Data mengenai besaran UMP provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi dijelaskan melalui tabel 1.4 berikut:

Tabel 1. 4 Upah Minimum Menurut Provinsi Tahun 2015–2017 (Rupiah)

Provinsi	Tahun			
Provinsi	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	2.700.000	3.100.000	3.355.750	
Jawa Barat	1.127.700	2.250.000	1.420.624	
Jawa Tengah	1.100.000	1.265.000	1.367.000	
DI Yogyakarta	1.114.731	1.237.700	1.337.645	
Jawa Timur	1.127.700	1.273.490	1.388.000	
Banten	1.600.000	1.784.000	1.931.180	
Sulawesi Utara	2.150.000	2.400.000	2.598.000	
Sulawesi Selatan	2.000.000	2.250.000	2.500.000	
Sulawesi Tengah	1.500.000	1.670.000	1.807.775	
Sulawesi Tenggara	1.652.000	1.850.000	2.002.625	
Gorontalo	1.600.000	1.875.000	2.030.000	
Sulawesi Barat	1.655.500	1.864.000	2.017.780	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015–2017

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa daerah dengan rata-rata upah minimum provinsi tertinggi dalam kurun waktu 2015–2017 adalah DKI Jakarta sebesar Rp. 3.051.910, kemudian Banten dengan rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp. 1.771.720. Dalam kurun waktu yang sama DI Yogyakarta memiliki rata-rata upah minimum provinsi terendah yaitu sebesar Rp. 1.230.000. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi berdasarkan masing-masing provinsi secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilihat dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengindikasikan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran adalah investasi. Investasi memberikan peluang kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya, agar tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Investasi merupakan pengeluaran untuk penambahan barang modal yang bertujuan peningkatan produksi. Sukirno (2016) menyatakan bahwa penambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Semakin besar kapasitas produksi suatu perekonomian, maka akan semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan.

Tabel 1. 5 Realisasi Investasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi Tahun

Duovingi	Tahun			
Provinsi	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	65.442,32	57.875,12	109.515,36	
Jawa Barat	105.438,27	103.867,22	108.066,60	
Jawa Tengah	27.141,97	37.920,23	52.008,63	
DI Yogyakarta	1.591,53	1.211,94	789,10	
Jawa Timur	71.265,75	724.10,87	66.270,15	
Banten	45.776,79	51.553,28	56.429,43	
Sulawesi Utara	1.484,56	10.212,90	8.030,53	
Sulawesi Selatan	12.433,67	8.339,51	11.626,41	
Sulawesi Tengah	15.938,73	22.582,83	22.869,49	
Sulawesi Tenggara	4.015,68	6.847,48	12.537,46	
Gorontalo	189,49	2.373,14	1.447,93	
Sulawesi Barat	1.131,39	360,88	814,65	

2015–2017 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015–2017, diolah

Realisasi investasi provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi masih cenderung fluktuatif. Meningkatnya investasi di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya investasi tersebut akan

meningkatkan kegiatan perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor inflasi juga memiliki kontribusi dalam mempengaruhi pengangguran usia muda. Peningkatan biaya hidup kebutuhan dari tahun ke tahun tidak terlepas dari perkembangan tingkat inflasi, yaitu suatu proses kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam suatu perekonomian. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap pengangguran (Senet & Yuliarmi, 2014). Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan kesempatan kerja. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau jumlah tenaga kerja yang diserap akan kecil.

Tabel 1. 6 Tingkat Inflasi Menurut Provinsi Tahun 2014–2017 (Persen)

Provinsi -	Tahun			
Frovinsi	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	8,95	3,30	2,37	3,72
Jawa Barat	7,6	2,73	2,75	3,63
Jawa Tengah	8,22	2,73	2,36	3,71
DI Yogyakarta	6,59	3,09	2,29	4,20
Jawa Timur	7,77	3,08	2,72	4,04
Banten	10,20	4,29	2,94	3,98
Sulawesi Utara	9,67	5,56	0,35	2,44
Sulawesi Selatan	8,61	4,48	2,94	4,44
Sulawesi Tengah	8,85	4,14	1,49	4,33
Sulawesi Tenggara	7,40	1,64	3,07	2,96

Gorontalo	6,14	4,3	1,3	4,34
Sulawesi Barat	7,89	5,37	2,23	3,79

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014–2017

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan inflasi pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2014–2017. Rata–rata inflasi tertinggi setiap provinsi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,18%. Sedangkan pada tahun 2016 memiliki rata–rata inflasi terendah yaitu sebesar 2,23%. Terjadinya kenaikan inflasi yang tinggi tersebut karena disebabkan adanya kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM yang diputuskan oleh pemerintah menyebabkan hargaharga kebutuhan pokok menjadi melonjak terutama bahan makanan dan berimbas pada naiknya harga-harga secara umum.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pengangguran yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk atau total penduduk yang berdomisili didalam wilayah suatu negara. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi (Sukirno, 2016). Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya akan menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Namun apabila kenaikan jumlah angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja maka hal ini akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran. Itulah sebabnya jumlah penduduk yang tinggi bukan menjadi hal untuk dikatakannya sebuah pembangunan yang berhasil, justru dengan jumlah penduduk yang tinggi akan menjadikan suatu beban bagi

pembangunan tersebut. Menurut data dari BPS jumlah penduduk provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi dijelaskan melalui table 1.7 berikut:

Tabel 1. 7 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2016–2018 (Jiwa)

Provinsi	Tahun			
Provinsi	2016	2017	2018	
DKI Jakarta	10.277.628	10.374.235	10.467.629	
Jawa Barat	47.379.389	48.037.827	48.683.861	
Jawa Tengah	34.019.095	34.257.865	34.490.835	
DI Yogyakarta	3.720.912	3.762.167	3.802.872	
Jawa Timur	39.075.152	39.292.972	39.500.851	
Banten	12.203.148	12.448.160	12.689.736	
Sulawesi Utara	2.436.921	2.461.028	2.484.392	
Sulawesi Selatan	8.606.375	8.690.294	8.771.970	
Sulawesi Tengah	2.921.715	2.966.325	3.010.443	
Sulawesi Tenggara	2.551.008	2.602.389	2.653.654	
Gorontalo	1.150.765	1.168.190	1.185.492	
Sulawesi Barat	1.302.478	1.330.961	1.355.554	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016–2018

Tabel 1.7 menunjukkan jumlah penduduk pada provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi selama tahun 2016–2018. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 48.683.861 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,50% pada tahun 2018. Sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 1.150.765 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,81% pada tahun 2016. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran yang lebih banyak dari angka kematian, tetapi juga disebabkan perpindahan penduduk yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa

Barat. Karena daerah tersebut terdapat banyak pusat industri sehingga mendorong penduduk bermigrasi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian permasalahan, informasi, dan data mengenai adanya pengaruh produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi, investasi, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Usia Muda (Studi Kasus Provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi Tahun 2011–2019)".

B. Rumusan Masalah

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*Labor Force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001). Pengangguran secara umum terjadi karena rendahnya lapangan pekerjaan baru yang tersedia dibandingkan pertumbuhan pencari kerja yang baru. Penelitian ini akan membahas pengaruh dari PDRB, upah minimum provinsi, investasi, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap terhadap pengangguran usia muda provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka kajian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019?

- Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019?
- Bagaimana pengaruh investasi terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019?
- 4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019?
- Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019.
- Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019.
- Menganalisis pengaruh investasi terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019.
- 4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019.
- Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan di dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan agar terciptanya kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengangguran.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan masalah pengangguran.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Analisis

Pada penelitian ini akan mengamati pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum provinsi, investasi, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran usia muda provinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 2011–2019 digunakan analisis data panel dengan model estimator sebagai berikut:

$$PUM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMP_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 INF_{it} + \beta_5 JP_{it} + e_{it}$$
(1.1)

Keterangan:

PUM = Pengangguran Usia Muda (Persen)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)

UMP = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

INV = Investasi (Miliar Rupiah)

INF = Inflasi (Persen)

JP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

 β_0 = Konstanta

 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi

e = Error

i = Daerah penelitian

t = Waktu (tahun penelitian)

Sumber: Modifikasi kerangka pemikiran dari Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Jumlah Pengangguran di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 21–30. Dengan mengubah variabel dependen dan independen menjadi variabel pengangguran usia muda dan investasi, serta ditambahkan variabel independen inflasi.

E.2 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* dalam penelitian ini meliputi dua belas data mewakili enam provinsi di Pulau Jawa dan enam provinsi di Pulau Sulawesi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu data *time series* sebanyak sembilan data mewakili data tahunan, yaitu dari tahun 2011–2019. Data yang digunakan antara lain data pengangguran usia muda, data produk domestik regional bruto, data upah minimum provinsi, data investasi, data inflasi, dan data jumlah penduduk. Sumber data berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I: PENDAHULUHAN

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan landasan teoritis penelitian, hubungan antara variabel-variabel yang digunakan, penelitian terdahulu serta uraian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang uraian tentang metode analisis data yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta definisi operasional variabel.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian, hasil pengolahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, kemudian dilakukan pengujian serta diuraikan interpretasi dari hasil pengolahan data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil dari data yang telah dianalisis serta saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.